

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Nurcholis, 2008, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta, Gramedia.
- Asmuni, Khoiri, Nispul, 2017, *Fikih Kontemporer dalam Ragam Aspek Hukum*, Medan. Wal Ashri Publishing.
- Dahwal, Sirman, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung. Mandar Maju.
- Darmabrata, Wahyono. 2003, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta, Gitama Jaya.
- Djamali, R. Abdoel, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Eoh, O.S, 1998, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Gelgel, I Putu dan Ni Luh Gede Hadriani. 2020. *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*. Denpasar. UNHI Press
- Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. 2021. *Hasil Persidangan Sinode XXI GPIB Tahun 2021 Buku I Ketetapan Nomor II dan Nomor V tentang Naskah Pemahaman Iman dan Naskah Akta Gereja*. Surabaya, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat.
- Hadikusuma, Hilman. 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Harahap, Yahya. 2006, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Konferensi Waligereja Indonesia. 1991. *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta. Obor.
- Konferensi Waligereja Indonesia. 2009. *Kompendium Katekismus Gereja Katolik 1637*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius
- Kussoy, J. 2001. *Menuju Kebahagiaan Kristiani dalam Perkawinan*. Malang. Gandum Mas.

- Liang, Mulyadi. 2022. *Tata Upacara Li Yuan Pernikahan Agama Khonghucu (Ru Jiao)*. Pontianak. Yudha English Gallery
- Lon, Yohanes Servatius. 2019. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta. Penerbit PT. Kanisius.
- M.K., Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- MATAKIN, 2008. *Panduan Tata Cara dan Upacara Liep Gwan/Li Yuan Pernikahan*. Jakarta. Pelita Kebajikan
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukhtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Paul VI, 1965, *GAUDIUM ET SPES:Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia Dewasa Ini Dokumen Konsili Vatikan II*. Dalam Seri Dokumen Gerejawi Nomor 19. Jakarta. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1986 *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Rafeldi, Mediya, 2016, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta, Alika.
- Rusli, Tama, R., 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung, Penerbit Pionir Jaya.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat I*, Bandung, Pustaka Setia.
- Satrio, J, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok, UI-Press.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, 2007, *Basics of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Technique*. Shodiq, Muhammad, Imam Muttaqien. 2007, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

- Sudarto. 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Sudharta, Tjok. 2003. *Slokantara Untaian Ajaran Etika, Teks, Terjemahan dan Ulasan*. Suramaya. Paramitha.
- Sumiarni, Endang. 2004. *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta. Wonderful Publishing Company.
- Tama, R. Rusli. 2000. *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya*, Bandung, Penerbit Pionir Jaya.
- Timahi, Sahrani, Sohari. 2013, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Wijaya, Budi, 1998. *Dinamika Minoritas Konfusiani, Sebuah Catatan dalam Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Kong Hu Cu Perspektif Sosial, Legal dan Teolog (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta. Gramedia.
- Wiludjeng, Henny. 2020. *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Jurnal dan Tesis

- Budiarti. “Integrasi Agama dan Negara dalam Produk Hukum Perkawinan Perspektif Negara Hukum Indonesia”. *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus. Volume 2 Nomor 1, Desember 2016.
- Dianti, Novina Eky. “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Surakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2016.
- Karim, Panghulu Abdul. “Mema’nai Syahadatain dan Keutamaannya dalam Kehidupan”. *Nuhamiyah Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan* Volume VII Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Mursalin, Ayub. “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia”. *Undang: Jurnal Hukum*. Universitas Jember. Volume 6 Nomor 1, 2023.
- Megawati. “Ketentuan Hukum Positif Indonesia dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya”. *Journal of Legal Research*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Volume 4 Nomor 4, 2021.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial*

Keagamaan Yudisia. Institusi Agama Islam Negeri Kudus Volume 7
Nomor 12, Desember 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Staatsblad 1898 Nomor 158. *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) tentang Peraturan dan Yang Disebut Perkawinan Campuran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 29 September 2022.

Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Pwt perihal Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama tanggal 6 Maret 2019.

Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.P/2019/PN.Dps perihal Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama tanggal 17 Oktober 2019

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jak.Sel perihal Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama tanggal 8 Agustus 2022.

Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 351/Pdt.P/2022/PN.Sda perihal Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama tanggal 21 November 2022.

Internet

Kementerian Agama, 2021. Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Republik Indonesia. Syarat Daftar Nikah Buddha, <https://bimbinganperkawinan.kemenag.go.id/syarat-daftar-nikah-buddha/> diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Proses Pencatatan Perkawinan dan Penerbitan Akta Perkawinan <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7942973/pemerintah-kab-banjarnegara/proses-pencatatan-perkawinan-dan-penerbitan-akta-perkawinan> diakses pada tanggal 25 September 2023

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti Disparitas, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas> Diakses pada tanggal 30 Mei 2023
- Komsos. 2017. Gereja Katolik Santo Stefanus Parok Cilanda – Keuskupan Agung Jakarta. Pernikahan Campur Beda Agama dalam Pandangan Katolik, <https://st-stefanus.or.id/berita/detail/pernikahan-campur--beda--agama--dalam-pandangan-katolik> diakses pada tanggal 7 Maret 2023.
- Kun, Winandriyo. 2014. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkawinan Beda Agama: PHDI dan KWI Berbeda Pendapat. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401> diakses pada tanggal 15 Mei 2023.
- Pengadilan Negeri Lahat, 2022. Pengadilan Negeri Lahat. Proses Acara Permohonan Perdata. <http://pn-lahat.go.id/index.php/layanan-publik/34-prosedur-pelayanan/370-proses-acara-permohonan-perdata> diakses pada tanggal 7 Maret 2023.
- Pengadilan Negeri Surabaya, 2022. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html> diakses pada tanggal 7 Maret 2023
- Rahman, Praditya Fauzi. 2023. Detik Jatim. Hukum dan Kriminal Putusan PN Surabaya Kabulkan Nikah Beda Agama Dianggap Langgar UUD 1945, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6573192/putusan-pn-surabaya-kabulkan-nikah-beda-agama-dianggap-langgar-uud-1945> diakses pada tanggal 7 Maret 2023
- Rizaty, Movana Ayu, 2023. Data Indonesia. Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022> diakses pada tanggal 10 September 2023.
- Susmayanti, Riana. 2014. Bahan Ajar Perluasan Berlakunya Hukum Perdata <http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/07/PHI-14-PERLUASAN-BERLAKUNYA-KUH-PERDATA.pdf> diakses pada tanggal 15 Mei 2023.
- Umam, Khaerul. 2022. Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Banten. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-alqur039an-dan-hukum-positif-di-indonesia.html#:~:text=oleh%20hukum%20negara.-,Al%2DQur'an%20dengan%20tegas%20melarang%20pernikahan%20seorang%20muslim%20%2F,dan%20al%2DMumtahanah%20ayat%2010.> diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

Zubaidah, St. 2019. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Memaknai “Freedom of Judge” dalam Kewenangan Hakim (Judges can not pass judgment on people better than God),
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-3-10> diakses pada tanggal 15 Mei 2023

Seminar

Abdurahman, Nurhasan. “Dampak Pra dan Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama” dalam Seminar Mudzakah Hukum Nasional dan Hukum Islam Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 pada tanggal 13 September 2023